

ANALISIS VISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER DI PERSEKOLAHAN DAN DI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBENTUK KARAKTER UNGGUL GENERASI MUDA

Dianni Risda¹⁾ dan Agil Nanggala²⁾

¹⁾Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia
Email: dianni@upi.edu

²⁾Prodi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia
Email: agilnanggala@upi.edu

ABSTRAK

Pendidikan karakter begitu penting diajarkan di persekolahan dan di perguruan tinggi, karena berkaitan dengan keadaban warga negara (*civic virtue*), pendidikan karakter menjadi wahana transformasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 pada generasi muda, riset ini bertujuan untuk menganalisis substansi, realisasi, dukungan kebijakan, hambatan juga potensi dari pendidikan karakter di persekolahan serta di perguruan tinggi, karena dimandatkan melalui konstitusi, peraturan pemerintah, dan kurikulum, sehingga seluruh sekolah dan perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan karakter untuk membentuk karakter unggul atau Pancasilais generasi muda. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis data adalah: reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian: 1) penerapan pendidikan karakter di sekolah begitu ditekankan oleh Kurikulum Merdeka 2022, melalui program profil pelajar Pancasila, yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kreativitas, daya kritis, dan mandiri, sangatlah berkaitan dengan pendidikan karakter, model pendidikan karakter di sekolah adalah: otonomi, integrasi, ekstrakurikuler, dan kolaborasi, tujuan pendidikan karakter perlu menjadi visi institusi, agar tujuan kurikuler dan instruksional setiap mata pelajaran di persekolahan mengakomodir penguatan karakter peserta didik, untuk mengatasi hambatan dan tantangan pendidikan karakter, sekolah perlu konsisten berinovasi pada kurikulum dan pembelajaran, memperkuat kualifikasi guru, optimalisasi ekstrakurikuler, mengoptimalkan teknologi, informasi dan komunikasi, serta meningkatkan atensi peserta didik, 2) kebijakan pendidikan karakter di perguruan tinggi, begitu dipengaruhi oleh otonomi perguruan tinggi, karena berwenang untuk menyusun serta mengembangkan kurikulum tentang pendidikan karakter, realisasi pendidikan karakter di perguruan tinggi, bisa melalui MKWK, mata kuliah khusus, unit kegiatan mahasiswa, model *service learning*, serta aktivitas pengembangan karakter mahasiswa, untuk mengatasi hambatan juga tantangan pendidikan karakter, perguruan tinggi perlu: mengembangkan ilmu dan pengetahuan, berinovasi dalam kurikulum dan pembelajaran, memperkuat kualifikasi dosen, optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi, dan merealisasikan kolaborasi *pentahelix*. Kesimpulan riset yaitu, eksistensi pendidikan karakter di persekolahan dan di perguruan tinggi mengakomodir visi pembentukan generasi muda yang unggul, dengan didukung konsep pendidikan karakter yang holistik dan integratif, tetapi harus disertai komitmen, konsistensi dan keteladanan setiap pihak.

Kata Kunci: Kurikulum; Pembelajaran; Pendidikan Karakter; Perguruan Tinggi; Sekolah.

ABSTRACT

Character education is so important to teach in schools and in universities, because it relates to civic virtue, character education is a vehicle for transforming the values of Pancasila and the 1945 Constitution to the younger generation, this research aims to analyze substance, realization, policy support, obstacles are also the potential of character education in schools and in tertiary institutions, because it is mandated through the constitution, government regulations, and curriculum, so that all schools and tertiary institutions are required to carry out character education to form superior or Pancasilaist character of the younger generation. This research was conducted through a qualitative approach with the method of literature study, data analysis was: reduction, display and verification. Research results: 1) the application of character education in schools is emphasized by the Merdeka

Curriculum 2022, through the Pancasila student profile program, which contains the values of divinity, humanity, unity, creativity, critical thinking, and self-reliance, is closely related to character education, the model of character education in schools are: autonomy, integration, extracurricular, and collaboration, the goals of character education need to become the vision of the institution, so that the curricular and instructional goals of each subject in Schooling accommodate strengthening the character of students, to overcome obstacles and challenges of character education, schools need to consistently innovate on the curriculum and learning, strengthening teacher qualifications, optimizing extracurriculars, optimizing technology, information and communication, and increasing students' attention, 2) character education policies in tertiary institutions, are heavily influenced by university autonomy, because they are authorized to compile and develop curricula on character education, realization of character education in tertiary institutions, can be through MKWK, special courses, student activity units, service learning models, as well as student character development activities, to overcome obstacles as well as challenges to character education, tertiary institutions need to: develop science and knowledge, innovate in curriculum and learning, strengthening lecturer qualifications, optimizing technology, information and communication, and realizing pentahelix collaboration. The conclusion of the research is that the existence of character education in schools and in tertiary institutions accommodates the vision of forming a superior young generation, supported by the concept of character education which is holistic and integrative, but must be accompanied by commitment, consistency and exemplary of each party.

Keywords: Curriculum; Learning; Character Education; Universities; Schools.

A. PENDAHULUAN

Eksistensi tentang pendidikan, baik di persekolahan juga di perguruan tinggi, adalah wahana vital pengelolaan sumber daya manusia Indonesia, agar berkarakter, unggul, dan berdaya saing. Tidak sebatas penguatan keterampilan saja, tetapi juga upaya peningkatan watak juga pengetahuan warga negara, agar menjadi warga negara dewasa, agar bisa diandalkan oleh negara, juga bersifat holistik, terlebih pembentukan keadaban warga negara, merupakan faktor penting terhadap kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia, sehingga bangsa tidak boleh terlena oleh sumber daya alam yang melimpah, karena berpotensi untuk habis. Realisasi Indonesia untuk menjadi bangsa maju, hendaklah didukung melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, agar terstruktur, masif juga sistematis, sehingga berdampak nyata bagi terwujudnya wacana generasi emas Indonesia 2045, agar bonus demografi tidak menjadi potensi masalah bagi bangsa pada waktu yang akan datang. Orientasi pendidikan karakter di Indonesia berupaya membangun peradaban bangsa yang maju, bermoral dan abadi, berbasis nilai-nilai Pancasila (Syofyan, 2017).

Merujuk laporan dari Kemendikbud (2017) menjelaskan Indonesia diproyeksi menjadi pusat ekonomi terkuat ke-5 pada 2045, juga menyokong 38% total penduduk produktif di ASEAN, sehingga berpotensi menjadi negara berpengaruh pada kawasan Asia Pasifik, juga mendapat peran penting atas orientasi peradaban dunia pada masa depan. Secara substantif, langkah konkret mendukung potensi tersebut, yakni melalui pendidikan karakter, baik di persekolahan, sebagai pendidikan dasar dan menengah, dan pada perguruan tinggi, selaku pendidikan tinggi, agar terintegratif dan berkelanjutan. Terlebih dimandatkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, selaku wahana vital untuk penguatan karakter warga negara, karena masuk pada kategori usia produktif, supaya pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pelajar serta mahasiswa, maka diharapkan bermanfaat positif membawa bangsa Indonesia dalam mencapai puncak peradaban bersifat agung (*civil society*). Pendidikan Pancasila dimandatkan melalui konstitusi untuk membentuk generasi muda Indonesia yang kuat dan Pancasilais, secara inklusif (Aditia & Dewi, 2022).

Merujuk Pusdatik Kemendikbud (2017) memaparkan usia rata-rata siswa dan siswi persekolahan adalah 7-18 tahun. Usia rata-rata mahasiswa Indonesia pada Strata 1, yaitu 18-24 tahun, maka menjadi umur yang produktif, yang harus dikelola dengan baik, khususnya potensi, mereka yaitu, kreatif, inovatif, digital serta kritis (Paramita, 2010). Realitas tersebut, tentu perlu dipandang penting oleh pendidikan pada jenjang persekolahan dan perguruan tinggi, sebagai wahana untuk membentuk karakter siswa serta mahasiswa, sehingga berkompeten untuk menjadi warga negara beradab (*civic virtue*). Keadaban warga negara adalah modal sosial mewujudkan visi *civil society* atau masyarakat madani Indonesia), sehingga budaya demokrasi dan politik partisipan bisa direalisasikan oleh generasi muda berbasis Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Indonesia memandang penting atas eksistensi pendidikan karakter, baik di persekolahan maupun di perguruan tinggi, karena berkaitan dengan habituasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda secara inklusif, ilmiah dan berkelanjutan. Terlebih sumber pendidikan karakter di Indonesia adalah Pancasila serta UUD 1945, maka diejawantahkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, bahwa Pendidikan Nasional berorientasi terhadap pengembangan kapasitas dan pembentukan watak juga peradaban bangsa bermartabat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa, agar potensi peserta didik berkembang, sehingga menjadi manusia beriman juga bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, juga mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Tujuan filosofis tersebut, bisa dikembangkan oleh setiap persekolahan dan perguruan tinggi, selaku tujuan institusional, terlebih konsep Kurikulum Merdeka 2022, memuat urgensi penguatan karakter Pancasila peserta

didik melalui profil pelajar Pancasila, maka pendidikan karakter perlu semakin inovatif, modern, inklusif, ilmiah serta partisipatif. Kurikulum Merdeka 2022, memuat profil pelajar Pancasila, yang menjadi visi, aksi dan rekomendasi penguatan karakter secara kurikuler, yaitu, nilai religius, akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, berdaya kritis, kreatif, serta mandiri (Kusumawati, 2022).

Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, di Pasal 62, menegaskan setiap perguruan tinggi memiliki otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk penyusunan dan pengembangan kurikulum. Tetapi pada landasan konstitusi tersebut, tepatnya pada Pasal 35 wajib mengakomodir mata kuliah, yaitu, Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, amanat konstitusi tersebut menegaskan urgensi pendidikan karakter di perguruan tinggi, yang menjadi modal akademik juga modal sosial untuk mengelola bonus demografi bangsa. Esensi tersebut berdampak pada wajibnya setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan karakter, baik secara tersurat maupun tersirat melalui MKWK, berbasis inovasi, keteladanan, dan ilmiah. Eksistensi pendidikan karakter memiliki tujuan yang holistik sekaligus berat, yaitu membentuk manusia yang seutuhnya, agar hidup selaras dengan hukum, etika, nilai, norma, yang eksis pada masyarakat, supaya kehidupan yang tertib dan beradab mampu terwujud (Ridhwan, et al. 2020).

Berbasis informasi argumentatif itu ditegaskan orientasi pendidikan katakter di persekolahan juga pada perguruan tinggi, mengakomodir upaya penguatan karakter dari peserta didik dan mahasiswa berdasar Pancasila dan UUD 1945 untuk membentuk generasi muda Indonesia bersifat unggul. Terlebih eksistensi pendidikan karakter ditekankan oleh Kurikulum Merdeka 2022, melalui Profil Pelajar Pancasila, termasuk penerapan otonomi bagi setiap perguruan

tinggi, tidak mengakibatkan hilangnya visi pengembangan karakter mahasiswa dalam kurikulum pendidikannya. Tetapi konsep otonomi perguruan tinggi, membuat setiap perguruan tinggi, semakin diberi kebebasan untuk melakukan inovasi dan eksplorasi tentang tujuan, konsep, metode, dan praktik pembelajaran atas pendidikan karakter pada perguruan tinggi, termasuk untuk seluruh persekolahan, sejauh masih relevan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yang diatur melalui konstitusi. Kebijakan terbaru pendidikan di Indonesia, yaitu, merdeka belajar dan kampus merdeka, yang bersifat modern, integratif, holistik serta digital, juga menekankan akan pentingnya upaya dalam pembentukan karakter peserta didik dan mahasiswa (Siregar, et al. 2020)

Berbasis Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia, layaknya Pasal 40, ditegaskan mengenai mata pelajaran wajib pada persekolahan, yaitu, Agama, Bahasa, Kewarganegaraan, Matematika, Jasmani, IPA, IPS, Seni Budaya dan Muatan Lokal, serta pada perguruan tinggi adalah Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa, selaku mata kuliah wajib kurikulum (MKWK), tentu bisa dioptimalkan agar menjadi pendidikan karakter, baik secara eksplisit dan implisit. Eksistensi pendidikan karakter bertujuan memperkuat kapasitas pengetahuan, sikap juga keterampilan peserta didik berkaitan dengan perilaku dalam bersosial, karena mentransformasikan beragam karakter dan nilai yang terpuji, supaya menjadi warga negara yang unggul. Terlebih peserta didik atau mahasiswa, memiliki potensi secara umum, yaitu berbicara, membaca, merasa, menulis, bergaul, menilai, berdaya kritis, berkomunikasi serta membuat keputusan, maka eksistensi pendidikan karakter begitu bagi persekolahan juga perguruan tinggi, agar potensi peserta didik bisa dioptimalkan berbasis nilai dan norma dalam masyarakat. Eksistensi pendidikan karakter merupakan upaya pemerintah untuk penguatan

karakter peserta didik, karena pendidikan karakter mengakomodir basis spiritual, intelektual, emosional dan sosial, yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik, tentu realisasi pendidikan karakter bisa dilaksanakan secara terintegrasi juga terpisah (Rahim, 2018).

Pemberlakuan pendidikan karakter di persekolahan juga di perguruan tinggi, berorientasi untuk merealisasikan karakter unggul peserta didik dan mahasiswa maka mencerminkan karakter Pancasila, dan mampu berkontribusi untuk kemajuan dan kepentingan negara-bangsa Indonesia. Visi itu membuat lembaga yang berwenang merealisasikan pendidikan karakter pada persekolahan dan perguruan tinggi, perlu mengoptimalkan mata pelajaran dan mata kuliah wajib, yang diinformasikan di atas, karena struktur keilmuan, materi, konsep dan praksis pembelajarannya begitu relevan dengan orientasi dari pendidikan karakter, sehingga bisa diberdayakan untuk menjadi pendidikan karakter di persekolahan serta pada perguruan tinggi, baik secara eksplisit, dan implisit. Pendidikan karakter berupaya memberi pemahaman utuh dan membentuk perilaku peserta didik, supaya hidup selaras dengan, hukum, nilai, norma, yang berlaku dimasyarakat, agar menjadi manusia yang seutuhnya (Suartama, et al. 2020). Secara substantif Indonesia telah memandang penting atas upaya pembentukan karakter bangsa, yang dideskripsikan oleh kebijakan nasional atas pembangunan karakter bangsa 2010-2025, sebagai berikut:

Gambar 1
Siatas Makro Pendidikan Karakter



Sumber: Pemerintah Republik Indonesia (2010)

Perlu dianalisis secara holistik juga ilmiah atas penerapan kebijakan dan aksi pendidikan karakter di persekolahan juga di perguruan tinggi, supaya diketahui fakta, hambatan, potensi juga tantangan dalam merealisasikan pendidikan karakter secara holistik, supaya menjadi basis ilmiah untuk memperbaiki realisasi pendidikan karakter di persekolahan, juga di perguruan tinggi, baik pada tataran konsep maupun praktik. Riset terdahulu pada penelitian ini, adalah dari Kahfi (2022) tentang “Implementasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya terhadap Karakter Siswa di Sekolah”, menegaskan eksistensi pendidikan karakter di Indonesia berbasis nilai-nilai Pancasila dan Kompetensi Abad Ke-21, sehingga mengarah pada penguatan profil pelajar Pancasila. Indonesia tengah memperoleh bonus demografi, tentu perlu disertai oleh pendidikan karakter yang holistik, ilmiah serta modern, supaya tidak menimbulkan kriminalitas juga patologi sosial. *Novelty* yang diorietasikan pada riset ini adalah dirampungkannya kajian holistik mengenai visi dan konsep pendidikan karakter di persekolahan dan di perguruan tinggi dalam membentuk karakter unggul generasi muda, agar mengarah pada *civil society*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur, agar kapabel merampungkan riset tentang analisis visi dan konsep pendidikan karakter di persekolahan dan di perguruan tinggi dalam membentuk karakter unggul generasi muda. Realitas riset kualitatif yang bersifat mendalam, natural, elaboratif juga partisipatif, tentu membuat peneliti tertarik dalam menggunakan pendekatan itu untuk merampungkan riset ini, karena berkaitan dengan *novelty*, yang memuat visi, konsep, praktik, dan model pendidikan karakter di persekolahan dan perguruan tinggi, maka bersifat holistik dan representatif. Referensi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua,

pertama, primer, yaitu artikel jurnal, karena memiliki keabsahan bersifat tinggi, *kedua*, sekunder, yaitu, buku dan dokumen, selaku upaya dalam meminimalisir kesalahan riset yang bersifat, konseptual, prosedural dan praksis, upaya ilmiah itu dilakukan agar memperoleh hasil riset yang berkualitas dan tidak bias. Analisis data mengoptimalkan teknik dari Miles dan Huberman (2014) yang memaparkan teknik atau prosedur analisis data kualitatif, secara bertahap, yaitu, reduksi, display data dan verifikasi.

C. PEMBAHASAN

1) Analisis Visi dan Konsep Pendidikan Karakter Di Persekolahan.

Implementasi pendidikan karakter di persekolahan, tentu dipandang sebagai kebutuhan yang penting, karena berkaitan dengan keadaban dan kompetensi generasi muda Indonesia, dan kemajuan peradaban bangsa. Substansi tersebut dibuktikan oleh orientasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan urgensi pembentukan dan penguatan karakter peserta didik, yang terpuji selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga menjadi warga negara yang bisa diandalkan oleh negara. Terlebih setelah diterapkannya Kurikulum Merdeka 2022, yang memuat profil pelajar Pancasila, tentu menekankan pentingnya pembentukan karakter peserta didik yang mencerminkan nilai dan karakter Pancasila, yaitu, religius, berakhlak mulia, berbhineka secara global, bergotong royong, berdaya kritis, kreatif, dan mandiri, maka aktivitas belajar peserta didik tidak hanya secara teoretis, tetapi juga praktik, kolaboratif, dan *project based learning*, untuk memberikan pengalaman belajar terbaik, bermakna dan berdampak nyata bagi penguatan karakter unggul peserta didik. Kurikulum Merdeka 2022, melalui profil pelajar Pancasila, tentu menjadi wahana pendidikan karakter yang holistik, kontekstual dan integratif, karena berupaya membangun peserta didik yang

berwawasan dan berkarakter Pancasila juga berkompetensi global, agar berdaya saing dan unggul (Dafitri, et al. 2022).

Tujuan Kurikulum Merdeka 2022, pada profil pelajar Pancasila, menegaskan urgensi pendidikan karakter, selaku wahana pembentukan peserta didik yang bermental, bernilai, dan memuat karakter profil pelajar Pancasila, yaitu, religus, berkebhinnekaan secara global, bergotong royong, berdaya kritis, kreatif, dan mandiri. Terlebih pada Kurikulum Merdeka 2022, pendidikan dan pembelajaran diberlakukan sebagai proses, tidak hanya berfokus pada hasil, mengingat setiap peserta didik memiliki kapasitas dan keunggulannya tersendiri, baik pada ranah *civic knowledge, civic skills, maupun civic disposition*, maka penting untuk memuat upaya penguatan minat dan bakat peserta didik secara demokratis, pandangan mulia itu menjadi paradigma pada Kurikulum Merdeka 2022, dengan memuat konsep *student centered learning, problem based learning, contextual teaching and learning*, dan profil pelajar Pancasila. Substansi itu menegaskan Kurikulum Merdeka 2022 begitu memandang penting eksistensi atas pendidikan karakter, yang bisa diterapkan secara tersurat dan tersirat pada kurikulum pembelajaran setiap mata pelajar, untuk membangun karakter unggul peserta didik, selaku warga negara muda yang kaabel diandalkan. Kurikulum Merdeka memuat visi dalam membentuk karakter disiplin dan tangguh peserta didik, melalui gerakan habituasi nilai Pancasila, juga optimalisasi minat juga bakat peserta didik (Indriani, et al. 2023).

Pada basisnya Kurikulum Merdeka 2022, khususnya profil pelajar Pancasila begitu relevan dengan orientasi dan konsep Peraturan Persiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mengamanatkan pada Pasal 4, bahwa realisasi pendidikan karakter harus eksis di lingkungan sekolah dan masyarakat, agar holistik dan berkesinambungan. Substansi

itu menegaskan kurikulum pendidikan, visi pembelajaran, kebijakan, program dan aksi sekolah, harus memuat konsep pendidikan karakter, agar peserta didik menjadi unggul, lali seluruh mata pelajaran perlu memuat upaya dalam memperkuat karakter peserta didik, terutama pada Pendidikan Agama, serta Pendidikan Pancasila, mengingat pada kurikulum Merdeka 2022, PPKn berubah menjadi Pendidikan Pancasila. Tujuan atas pendidikan Karakter di lingkungan sekolah adalah membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang religius, humanis, dan berdaya, agar relevan dengan nilai, moral, hukum, yang berlaku di masyarakat atau sosio-kultural, sehingga merepresentasikan karakter unggul atau Pancasila. Proses habituasi atau pembiasaan, menjadi bagian paling sukar dalam mewujudkan orientasi atas pendidikan karakter, karena diperlukan komitmen serta konsistensi dari pendidik, untuk memberikan keteladanan mengenai implementasi karakter terpuji, maka akan efektif apabila berbasiskan intrakurikuler dan ekstrakurikuler (Suatno & Nurdiyana, 2020).

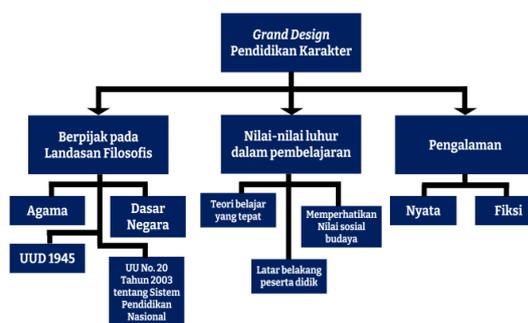
Eksistensi atas pembelajaran wajib di persekolahan, selaras yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 40, yaitu, Agama, Pancasila, Bahasa, Matematika, Jasmani, IPA, IPS, Kejuruan, Seni Budaya juga Muatan Lokal, idealnya perlu menjadi wahana pendidikan karakter, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Terlebih perlu diakomodasi pada eksistensi mata pelajaran yang berkiatan dengan pengembangan kepribadian peserta didik, seperti Agama dan Pancasila, tentu perlu memuat visi dan konsep, juga praktik pendidikan karakter. Realisasi pendidikan karakter pada persekolahan, bisa berbasis kurikuler atau pembelajaran teoretis dan berbasiskan ekstrakurikuler atau kegiatan non-akademik peserta didik di luar kelas, agar bersifat komprehensif, kontekstual dan masif, untuk membangun karakter unggul

peserta didik. Model realisasi pendidikan karakter di persekolahan, dibagi atas: 1) otonomi, konsep mata pelajaran pendidikan karakter yang mandiri, 2) integrasi, memuat konsep juga materi pendidikan karakter di kurikulum dan seluruh mata pelajaran, 3) ekstrakurikuler, berbasis pada aktivitas non akademik, dan 4) kolaborasi, integrasi atas semua model pendidikan karakter (Riyanto dalam Dalyono dan Lestariningsih, 2017).

Secara substantif model Pendidikan karakter yang paling masing dioptimalkan di sekolah, mengarah pada model terintegrasi, ekstrakurikuler, dan kolaborasi atas seluruh model pendidikan karakter di persekolahan. Mengingat karena efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, terlebih atas amanat konstitusi dan struktur keilmuan yang mumpuni atas mata pelajaran Agama serta Pancasila, selaku mata pelajaran wajib, yang kedudukannya diperkuat oleh Kurikulum Merdeka 2022, melalui visi profil pelajar Pancasila, tentu semakin menekankan urgensi pendidikan karakter yang memuat model *project based learning*, selaku upaya alternatif penguatan karakter, tentu menjadi pembuktian bahwa model bersifat terintegrasi, ekstrakurikuler dan kolaborasi begitu masif menjadi aksi, praktik atau wahana pendidikan karakter di persekolahan. Masalah bersifat aktual bagi pendidikan karakter di persekolahan adalah fenomena *loss learning* setelah Pandemi Covid-19, membuat peserta didik kesulitan beradaptasi pada pembelajaran langsung, tentu penerapan Kurikulum Merdeka 2022 juga berupaya untuk mengatasi fenomena tersebut, yang disertai penguatan karakter peserta didik secara inklusif, melalui profil pelajar Pancasila. Implementasi Kurikulum Merdeka 2022, adalah untuk mengatasi persoalan *loss learning*, baik pada tataran pengetahuan, karakter dan keterampilan, karena pembelajarannya bersifat holistik, dengan orientasi penguatan profil pelajar Pancasila, berbasis *Project Based Learning* (Jojo & Sihotang, 2022).

Pada basisnya pendidikan karakter perlu disertai dengan sumber, teori, metode, model dan kurikulum pembelajaran yang memadai, karena pendidikan karakter tidak berfokus pada penguatan pengetahuan juga keterampilan peserta didik. Tetapi berfokus pada penguatan karakter peserta didik, agar watak juga kepribadiannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga UUD 1945. Tentu pendidikan karakter membuat peserta didik hidup berbasis pada Agama, hukum, moral, nilai, norma yang berlaku pada lingkungan sosial sebagai wahana peserta didik untuk berinteraksi sosial juga beraktivitas (Irsan & Rijal, 2020). Realitas sosial bahwa setiap sekolah memiliki kebijakan, strategi juga praksis dalam melaksanakan pendidikan karakter, tentu perlu dihargai, tetapi untuk mewujudkan harmonisasi di setiap sekolah dalam merealisasikan pendidikan karakter, nyatanya perlu disepakati mengenai *grand design*, sebagai konsensus atas pendidikan karakter di persekolahan, sehingga *grand design* pendidikan karakter secara umum perlu berbasis dasar filsafat bangsa, sebagai berikut:

Gambar 2
Grand Design Pendidikan Karakter



Sumber: Barnawi dan Arifin (2016)

Pemberlakuan pendidikan karakter selaku mata pelajaran yang berdiri sendiri, atau mandiri, tentu perlu memperhatikan sumber daya dan kurikulum, karena pada implementasinya tidak memiliki perbedaan bersifat spesifik atas mata pelajaran Agama juga Pendidikan Pancasila, karena struktur keilmuan, teori, model, orientasi, konsep dan praksis keilmuan juga pembelajarannya

begitu kapabel untuk dioptimalkan selaku pendidikan karakter. Esensi itu membuat kurikulum pada setiap persekolahan yang bersifat kurikuler (pembelajaran) serta instruksional, perlu mengkomodir upaya penguatan karakter peserta didik, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Terlebih penguatan karakter peserta didik tidak sebatas tanggung jawab dari pengajar atau guru Pendidikan Agama serta Pendidikan Pancasila saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh guru, karena pada hakikatnya pendidikan adalah upaya dalam memanusiakan manusia, maka perlu bersifat holistik dengan mengarah pada pengetahuan, karakter, serta keterampilan, sehingga menjadi peserta didik memiliki karakter unggul atau Pancasilias. Eksistensi pendidikan karakter sangat penting untuk diajarkan, dihabituisasikan, dikembangkan di persekolahan, karena menjadi modal sosial dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, beradab dan maju (Surya, 2017)

Implementasi pendidikan karakter di persekolahan, perlu berbasis Pancasila juga UUD 1945, sebagai ideologi, landasan filsafat, kepribadian juga dasar hukum bagi bangsa Indonesia, agar terwujudnya suatu harmonisasi dalam upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda di persekolahan. Terlebih Ideologi Pancasila serta UUD 1945, berdasarkan nilai-nilai religius (agama), kemanusiaan, persatuan serta demokrasi atau musyawarah, yang berupaya merealisasikan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka hasil atas realisasi pendidikan karakter di persekolahan adalah untuk membentuk peserta didik yang religius dan humanis, berdaya, sehingga terlibat aktif dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang damai, aman, tertib, adil serta sejahtera, sehingga mencerminkan karakter unggul. Struktur atas kurikulum pembelajaran di sekolah perlu adaptif pada modernisasi dan mengkomodir penguatan karakter religius dan humanis, supaya praktik pembelajaran

tidak sebatas visi akademik (Atma, 2019). Eksistensi kurikulum begitu penting pada penerapan pendidikan karakter di sekolah, agar memiliki visi, misi, konsep, strategi, metode, serta praksis yang jelas, terlebih sekolah dan pendidik berhak menyusun serta mengembangkan orientasi pendidikan yang bersifat institusional, kurikuler dan instruksional.

Dalam merealisasikan pendidikan karakter di persekolahan, tentu lingkungan serta sumber daya manusia milik sekolah perlu mendukung, karena proses penguatan karakter peserta didik, bersifat panjang dan berkesinambungan, maka sumber dayanya perlu mumpuni. Pandangan itu membuat pemerintah dan sekolah perlu mewujudkan visi sekolah religius, ramah HAM, berbasis lingkungan, sekolah budaya, serta wacana lainnya, supaya implementasi pendidikan karakter di sekolah bermanfaat positif bagi pembentukan watak dan kepribadian yang merepresentasikan Pancasila peserta didik. Terlebih implementasi pendidikan karakter pada persekolahan, apabila tidak didukung dengan lingkungan sosial dan sumber daya manusia yang memadai, tentu akan sukar mewujudkan orientasi pendidikan karakter, karena visi, konsep dan praktik pendidikan dan pembelajaran karakter perlu bersifat utuh, karena tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga luar kelas, selaku ekstrakurikuler, maupun *service learning*. Eksistensi ekstrakurikuler begitu penting untuk menjadi wahana pendidikan karakter holistik bagi peserta didik, karena program penguatan karakter di sekolah tidak bersifat efektif juga efisien apabila hanya dilakukan berbasis pembelajaran teoretis (Zulkifli & Wirdanengsih, 2020).

Penguatan kapasitas karakter atau watak peserta didik, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tentu perlu dipandang selaku visi penting pendidikan karakter di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, selain orientasi penguatan dalam kompetensi peserta didik supaya bersifat

holistik. Substansi tersebut perlu dipandang penting oleh setiap pendidik atau guru, agar peserta didik mampu dalam menelaah dan merefleksikan beragam perilaku yang boleh bahkan tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, sehingga berbasis pengalaman, kesadaran, keadaban, dan kesukarelaan, karena inti pendidikan karakter adalah keteladanan, kesadaran dan habituasi. Kesuksesan pendidikan karakter direpresentasikan dari perilaku dan watak peserta didik yang mampu merealisasikan perilaku terpuji berbasis nilai dan moral Pancasila pada kesehariannya, karena inti ayas pendidikan karakter adalah habituasi karakter religius, humanis, moralis, serta berdaya (Kobandaha, 2017). Habituasi atas karakter terpuji di persekolahan, tentu perlu dilaksanakan secara profesional, beradab, dan komprehensif, dengan didukung oleh kebijakan sekolah yang memuat upaya penguatan karakter peserta didik, selaras yang diamanatkan konstitusi.

Pada basisnya pendidikan karakter begitu dipengaruhi oleh pandangan tentang pentingnya implementasi karakter terpuji, sehingga teori belajar behaviorisme, begitu relevan untuk dioptimalkan dalam analisis serta praktis pendidikan karakter. Terlebih meyakini suksesnya pembelajaran akibat didukung melalui perilaku guru dan peserta didik, yang bisa menghasilkan stimulus dan respons, yang bermanfaat bagi keberhasilan atas pendidikan karakter di persekolahan, pada konteks Indonesia, tentu mengarah pada karakter unggul berbasis Pancasila. Pendidikan karakter begitu relevan dengan teori behaviorisme, yang mengutamakan aspek perilaku dalam pembelajaran dengan berbasis stimulus dan respons, tentu agar aksi pendidikan karakter di persekolahan berjalan efektif, maka perlu disertai oleh inovasi, keteladanan, model belajar yang holistik, dan aksi pembelajaran kontekstual mengenai realitas karakter dimasyarakat (Munawwarah dan Maemonah, 2021). Visi dan substansi pendidikan karakter adalah

religius, humanis, habituasi, juga moral, sehingga implementasi pendidikan karakter di persekolahan juga perlu memperhatikan inti tersebut, agar tidak sebatas seremonial, pendidikan karakter perlu menjadi motivasi bagi setiap peserta didik untuk konsisten meningkatkan level watak dan karakternya, sekaligus menjadi wahana refleksi tentang kesalahan peserta didik, sehingga praksis stimulus juga respons dalam pendidikan karakter harus bersifat humanis.

Pemberlakuan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, yang memuat Kurikulum Merdeka 2022, tidak melupakan urgensi penguatan karakter peserta didik, karena visi belajar karakternya mengarah pada profil pelajar Pancasila, maka walau kebijakan tersebut bersifat modern, karena berbasis keterampilan dan digital, tetapi tidak melupakan pentingnya pembentukan karakter unggul peserta didik. Melalui Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) ditegaskan pembentukan kepribadian dan kompetensi peserta didik adalah orientasi penting kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Amanat tersebut membuat setiap sekolah perlu menjamin realisasi pendidikan karakter sebagai salah satu program pembelajaran bersifat wajib bagi peserta didik, karena pendidikan karakter merupakan kebijakan pendidikan bersifat vital, dalam membangun karakter unggul peserta didik, tentu setiap sekolah memiliki pengalaman, ciri khas, program, pertimbangan, kebijaksanaan dan hambatan dalam merealisasikan program pendidikan karakter, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Kebijakan merdeka belajar adalah wahana alternatif penguatan pendidikan karakter di persekolahan, karena berbasis pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, agar peserta didik sebagai bonus demografi, bisa dikelola secara adil, profesional, dan humanis juga berkualitas (Kahar, 2021)

Faktanya setiap sekolah memiliki hambatan juga tantangan tersendiri dalam merealisasikan pendidikan karakter, tentu

realitas tersebut lumrah, sebagai dinamika juga problematik dalam pendidikan, yang perlu diatasi secara bermutu dan bijaksana. Terlebih pada modernisasi, tentu tuntutan pendidikan menjadi semakin dimanis juga kompleks, maka setiap sekolah perlu terus beradaptasi pada realitas tersebut, melalui pengembangan kurikulum, inovasi dalam pembelajaran, peningkatan mutu pendidik atau guru, peningkatan atensi peserta didik dalam pembelajaran karakter. Substansi itu membuat visi dan konsep pendidikan dan pembelajaran karakter di sekolah, perlu mengarah pada pembentukan karakter atau kepribadian unggul, sehingga realisasinya perlu semakin bermutu, dan kapabel dalam mengatasi krisis moral masyarakat yang menjadi diskursus begitu menarik pada era globalisasi, terlebih peserta didik menjadi bonus demografi Indonesia, tentu karakter mereka perlu dibentuk, agar Indonesia bisa mencapai puncak peradabannya. Tantangan pendidikan karakter di persekolahan secara umum adalah: 1) struktur kurikulum serta adaptasi kebijakan sekolah, 2) kesadaran guru tentang urgensi pendidikan karakter, 3) fakta mutu personalia, 4) globalisasi dan westernisasi, juga 5) kondisi lingkungan sosial (Triatmanto, 2010).

Realitas globalisasi adalah pisau bermata dua apabila tidak disikapi secara bijaksana, khususnya melalui pendidikan karakter, yang berperan preventif, supaya peserta didik, sebagai pemimpin nasional di masa depan, tidak kehilangan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Berbasis substansi tersebut, perlu disikapi oleh setiap sekolah, sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pendidikan karakter, melalui pengembangan kurikulum yang beradaptasi pada upaya penguatan karakter dari peserta didik, realisasi orientasi sekolah religius, berbudaya, adiwiyata, ramah anak, ramah HAM, juga wacana sekolah positif lainnya. Terlebih eksistensi atas pendidikan karakter apabila tidak didukung oleh visi sekolah

atau institusi, serta konsep yang holistik, tentu tidak akan efektif dalam praktiknya, maka visi karakter unggul peserta didik tidak akan terwujud. Pendidikan karakter begitu penting diajarkan di persekolahan, sehingga tujuan pendidikan karakter perlu diakomodir menjadi tujuan setiap sekolah, tentu peran kepala sekolah begitu penting dalam merealisasikan pendidikan karakter sebagai visi dan program di persekolahan (Widodo, 2018).

Narasi mengenai pembentukan dan penguatan karakter patut dipandang penting oleh setiap sekolah, baik bersifat eksplisit maupun implisit, karena telah dimandatkan oleh konstitusi, peraturan pemerintah, juga Kurikulum Merdeka 2022. Substansi itu membuat eksistensi pendidikan karakter perlu diakomodir menjadi visi dan program sekolah, agar mendapatkan legitimasi kuat, termasuk memiliki konsep yang holistik, agar bermutu dalam tataran realisasinya. Pengelolaan bonus demografi Indonesia akan semakin bermutu, inklusif, dan bisa meminimalisir potensi negatif, akibat watak bangsa yang tidak kuat dan beradab, seperti kriminalitas bahkan penyimpangan sosial. Realitas atas kurikulum sekolah, kualifikasi tenaga pengajar, program dan strategi dari sekolah perlu adaptif terhadap penguatan karakter peserta didik, agar perkembangan kepribadian dan wataknya bersifat holistik, sehingga mampu berkontribusi aktif pada upaya bela negara, partisipasi publik, guna menjadi modal sosial merealisasikan *civil society* (masyarakat madani Indonesia).

2) Analisis Konsep Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi berperan penting bagi penguatan karakter unggul mahasiswa, karena menjadi wahana mahasiswa belajar, baik secara teoretis di dalam kelas, maupun, praktis dimasyarakat, maka visi, konsep dan inovasi pendidikan karakternya perlu relevan dengan era modern (Widihastuti, 2013). Substansi itu perlu didukung melalui

penguatn otonomi perguruan tinggi, yang selaras atas amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 62, yang berfokus pada konsep dan penerapan otonomi perguruan tinggi. Secara substantif setiap perguruan tinggi memiliki ciri khas atau keunikan dalam transformasi karakter mahasiswa secara inovatif dan humanis, akibat dari otonomi perguruan tinggi, tetapi visinya tetap, yaitu, penguatan karakter unggul mahasiswa atau Pancasilais. Kendati memiliki kewenangan itu tetapi pada basisnya setiap perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menerapkan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK), selaku realisasi atas pendidikan karakter yang bersifat basis pada perguruan tinggi, juga selaras dengan amanat dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, melalui Pasal 35, yang memandatkan setiap perguruan tinggi, supaya dalam penyusunan, realisasi dan pengembangan kurikulumnya, wajib mengakomodir Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, juga Kewarganegaraan, yang kapabel dioptimalkan sebagai pendidikan karakter di perguruan tinggi, untuk karakter unggul mahasiswa.

Pembentukan karakter mahasiswa adalah narasi yang sangat penting, terlebih apabila Indonesia bertujuan untuk menjadi negara yang maju, demokratis dan beradab. Tentu perlu berinvestasi pada realitas bonus demografi, sehingga mengurangi beragam potensi negatif, yang timbul akibat bonus demografi, yang tidak dikelola secara baik, benar, juga bijaksana, seperti kriminalitas serta penyimpangan sosial. Pada basisnya prodi atau unit kerja pelaksana pendidikan karakter, baik melalui MKWK, mata kuliah khusus dan aktivitas resmi pengembangan karakter mahasiswa, berperan vital dalam meminimalisir timbulnya potensi negatif bonus demografi Indonesia, setiap disiplin ilmu dimandatkan melalui konstitusi, untuk memuat pendidikan karakter baik tersurat maupun tersirat. Orientasi atas Pendidikan

karakter tidak untuk membentuk manusia menjadi alat produksi berbasis kapitalis, tidak juga berbasis pada doktrin dan dogma untuk melanggengkan kekuasaan, layaknya paradigma komunis, tetapi berupaya untuk memanusiakan manusia (Tyas, et al. 2020)

Realiasi pendidikan karakter perlu dilakukan secara profesional, komprehesif, berkualitas dan inovatif oleh lembaga, agar berdampak positif terhadap perkembangan karakter milik mahasiswa yang Pancasilias (Hidayah, et al. 2019). Substansi tersebut berdampak pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan karakter, seperti, program studi pendidikan umum, atau disiplin ilmu khusus bahkan unit kerja relevan lainnya, perlu memiliki orientasi lembaga, kurikulum, inovasi dan kebijakan bersifat jelas, termasuk mengenai orientasi kurikuler dan instruksional, yang perlu selaras dengan orientasi pendidikan bersifat nasional dan lembaga. Karena satuan kerja tersebut, menjadi penanggung jawab utama untuk suksesnya implementasi pendidikan karakter di setiap perguruan tinggi, dengan didukung secara optimal oleh pihak rektorat tentunya, Pada basisnya eksistensi MKWK, begitu relevan untuk dioptimalkan sebagai pendidikan karakter, tetapi hanya tersedia pada semester 1 atau 2, saat masih menjadi mahasiswa tingkat 1, sehingga perlu untuk dioptimalkan eksistesinya sebijaksana dan sebaik mungkin, agar mampu membentuk karakter unggul mahasiswa atau bersifat Pancasilais.

Eksistensi atas pendidikan karakter, perlu dipandang penting dalam kebijakan juga praksis pendidikan tinggi, karena pada basisnya pendidikan karakter terintegrasi dalam setiap mata kuliah, baik yang bersifat umum, maupun khusus atau spesifik. Tentu eksistensi atas mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) menjadi landasan implementasi pendidikan karakter pada perguruan tinggi, karena secara eksplisit, berbasis Pancasila serta UUD 1945, khususnya Pendidikan Agama, berbasiskan sumber hukum Agama

yang berisikan berbagai ajaran kebaikan, keteladanan juga perilaku terpuji. Sehingga kehidupan sosial masyarakat menjadi tertib, aman, juga bisa mewujudkan kesejahteraan umum, substansi tersebut merupakan bukti pentingnya pendidikan bagi kemajuan dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Perguruan tinggi melalui lembaga yang berwenang dalam menerapkan pendidikan karakter mampu dilakukan melalui model integrasi dengan ragam mata kuliah, baik umum maupun khusus, dan bisa dilakukan dengan program dan aktivitas positif yang kapabel memperkuat karakter mahasiswa, agar menjadi warga negara muda beradab (Hasanah, 2013)

Tentu setiap lembaga yang berhak melakukan pendidikan juga pembelajaran karakter pada perguruan tinggi, memiliki problematikanya tersendiri. Realitas tersebut lumrah, karena implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi, tentu bersifat kompleks dan dinamis. Akibat perlu adaptif pada modernisasi, dan mampu mengelola beragam isu yang relevan dengan substansi keilmuannya, agar bersifat aktual, faktual juga kontemporer, agar kajian pendidikan karakter berkembang, dan bisa mengatasi berbagai tantangan juga hambatan zaman, sehingga prodi atau unit kerja pelaksana pendidikan karakter, perlu konsisten serta komitmen dalam mewujudkan pendidikan karakter yang progresif, modern, inovatif, inklusif dan partisipatif. Tantangan umum untuk lembaga penyelenggara pendidikan karakter adalah: 1) dosen pengampu kurang berkompeten dibidangnya, 2) *background* akademik kurang profesional, 3) masih bersifat prosedural dan pragmatis, juga, 4) lembaga yang tidak memiliki fokus yang konsisten (Robby, 2020)

Melalui otonomi perguruan tinggi, berdampak terhadap diakomodirnya setiap program studi atau unit kerja penyelenggara pendidikan karakter untuk berinovasi pada pembelajaran, dan aktivitas non akademik, seperti, pengabdian masyarakat, mentoring,

tutorial, pelatihan, webinar, tahfidz quran, KKN tematik, serta yang lainnya, sebagai wahana pendidikan karakter, agar orientasi pendidikan nasional juga institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan serta pengembangan karakter mahasiswa bisa direalisasikan selaras dengan konstitusi. Tentu lembaga penyelenggara pendidikan karakter, perlu adaptif pada modernisasi, bahkan Revolusi Industri 4.0, agar menarik minat mahasiswa pada mata kuliah wajib kurikulum, selaku wahana formal bersifat teoretis sebagai pendidikan karakter. Walau bersifat wajib, tetapi apabila hanya sebatas seremonial dan pragmatis, tentu berpotensi terjadi distorsi antara cita-cita pendidikan karakter terhadap realitasnya. Pendidikan umum sebagai wahana pendidikan karakter begitu penting untuk transformasi karakter mahasiswa pada perguruan tinggi, bahkan merekayasa kehidupan sosial masyarakat, supaya berkualitas juga beradab, sehingga lembaga pengelola perlu konsisten dalam mengembangkan ilmu serta pengetahuan berbasis moralitas, demi kemajuan bangsa (Shih, 2019).

Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi, bisa dilakukan melalui 2 model, yaitu di dalam kelas yang berbasis teoretis juga di luar kelas, yang berbasis praksis (Muhibah, 2020). Tentu wahana pendidikan karakter pada perguruan tinggi, mengoptimalkan MKWK dan mata kuliah khusus, sehingga terintegrasi, maka dosen pengampu mata kuliah perlu memberikan keteladanan, selaras terhadap hakikat dari pendidikan, terlebih pendidikan tinggi yang perlu disertai dengan inovasi dan pemikiran kritis mahasiswa. Pendidikan karakter yang dilakukan di dalam kelas, bertujuan untuk memberikan materi, konsep, teori, urgensi dan landasan tentang pendidikan karakter, sebagai modal akademik bagi mahasiswa untuk berperilaku, dengan menaati hukum, nilai, juga norma, secara sukarela. Dalam tataran praksis, pendidikan karakter bisa dilakukan melalui beragam aktivitas positif

mahasiswa, bersifat ekstrakurikuler, secara internal, seperti mentoring, UKM bersifat pengembangan kepribadian di lingkungan perguruan tinggi, maupun eksternal, yaitu, pengabdian masyarakat juga KKN Tematik di lingkungan sosio-kultural.

Pada basisnya pendidikan karakter berperan strategis bagi upaya pembentukan keadaban mahasiswa (*civic virtue*), karena selaku indikator yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pembentukan warga negara yang cerdas dan baik. Terlebih tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada upaya penguatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, tetapi juga penguatan karakter, agar mampu menjadi warga negara yang berkontribusi untuk kemajuan negara dan berpartisipasi bagian kepentingan nasional. Pada konteks kajian kewarganegaraan, nyatanya tersedia kategorisasi kecerdasan yang perlu dimiliki warga negara, agar berdaya juga dewasa, yang bisa dijadikan sebagai orientasi atas pendidikan karakter pada perguruan tinggi, yaitu, penguatan *civic disposition*, sebagai salah satu kompetensi kewarganegaraan. Substansi kompetensi kewarganegaraan, bisa dikategorikan menjadi: 1) *civic knowledge*, adalah, warga negara yang berpengetahuan juga berwawasan, 2) *civic skills*, yaitu, warga negara yang terampil juga ahli, dan 3) *civic disposition*, yaitu, warga negara berkarakter juga berwatak (Branson, dalam Lonto, 2019).

Pada substansinya *civic disposition*, merupakan karakter juga watak, yang perlu dimiliki mahasiswa, selaku warga negara muda, guna menjadi bukti ketakwaan serta keimanannya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi bukti loyalitasnya pada NKRI. Sehingga kurikulum, pendekatan, substansi dan praksis pembelajaran dari pendidikan karakter, yang diberikan jurusan atau prodi penyelenggara di setiap perguruan tinggi, haruslah mengakomodir upaya penguatan karakter mahasiswa, supaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, selaku kekuatan juga ketahanan bagi Indonesia, karena merupakan ideologi, basis filsafat,

juga dasar hukum bagi bangsa Indonesia. Pada substansinya lembaga penyelenggara pendidikan karakter perlu memiliki tujuan, kurikulum, serta *logical framework*, supaya penguatan mutu dan karakter mahasiswa, selaku sumber daya manusia bisa terealisasi selaras dengan yang ditetapkan (Kabatiah, 2021). Tujuan karakter mahasiswa unggul dalam pendidikan karakter, tentu selaras dengan kapasitas *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* yang bermutu, akan mampu merealisasikan mahasiswa, sebagai warga negara muda beradab (*civic virtue*), supaya wacana *civil society* kapabel terwujud, seperti di bawah ini:

Gambar 3
Tujuan Holistik Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Sumber: Winataputra (2016)

Realisasi pengembangan kurikulum pendidikan karakter pada perguruan tinggi perlu berbasis pada penguatan kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, karena bersifat komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari *civic knowledge*, *civic skills*, bahkan *civic disposition*, yang merupakan modal sosial dalam mewujudkan keadaban mahasiswa (*civic virtue*), agar menjadi unggul. Tujuan pengembangan kurikulum diberlakukan supaya eksisnya harmonisasi pembentukan karakter unggul mahasiswa, berbasis Pancasila juga UUD 1945. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan selaku pendidikan Moral dan karakter yang direkomendasikan oleh lembaga kredibel, yaitu, *Center for Civic Education* pada

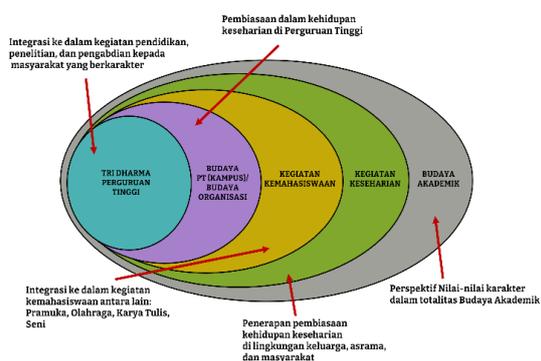
1999, melalui National Standard for Civics and Government, mengakomodir upaya peningkatan mutu *civic knowledge*, *civic skills* juga *civic disposition* secara holistik (Raharja, 2017). Berbasis informasi objektif di atas, tentu orientasi pendidikan karakter di perguruan tinggi perlu bersifat jelas, maka perlu mengakomodir penguatan *civic disposition*, yang bisa diejawantahkan oleh setiap perguruan tinggi, dengan upaya menganalisis serta merefleksikan beragam kebudayaan, nilai dan adat, bahkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat sekitar.

Pada substansinya kurikulum perlu bersifat fleksibel, karena hambatan bahkan hambatan zaman yang semakin dinamis dan kompleks, maka sifat fleksibel kurikulum, diharapkan mampu mengatasi problematik tersebut. Tentu pengembangan kurikulum tidak harus secara nasional, tetapi eksistensi kurikulum nasional menjadi pijakan untuk pengembangan kurikulum tingkat lembaga dan tingkat kurikuler (mata kuliah), terlebih dosen memiliki pertimbangan, kebijakan, serta mengetahui konfigurasi, juga kondisi dari mahasiswa yang mereka ajar, sehingga diberi kewenangan dalam mengembangkan kurikulum dari mata kuliah yang diampu. Pengembangan kurikulum, pada dasarnya bisa untuk dikategorikan menjadi 4 tingkatan, yakni: 1) makro atau nasional), 2) institusi atau lembaga pendidikan, 3) mata pelajaran dan mata kuliah atau bidang studi, juga 4) pembelajaran di dalam kelas (Fajri, 2019). Substansi itu membuat program studi yang dimandatkan untuk melakukan pendidikan karakter perlu memiliki konsistensi dalam mengembangkan kurikulumnya, baik pada MKWK, maupun mata kuliah khusus, yang bersifat modern, visioner, berkualitas, juga *scientific*, serta perlu untuk mengakomodir dokumen dan peraturan institusi perguruan tinggi tentang pendidikan tinggi.

Karakteristik atas pendidikan tinggi yang lebih diberikan kebebasan berinovasi dan pengelolaan perguruan tinggi, nyatanya perlu disertai manfaat nyata bagi penguatan

karakter mahasiswa. Sehingga penguatan karakter tidak sebatas dihabituasikan oleh pendidikan karakter yang bersifat teoretis di dalam kelas, tetapi juga melalui beragam aktivitas non akademik di perguruan tinggi bersifat positif. Realisasi pendidikan karakter di perguruan tinggi, bisa dilakukan melalui 3 model, yaitu: 1) pembelajaran di dalam kelas, 2) melalui model *service learning*, dan 3) melalui UKM mahasiswa, karena konsep pendidikan karakter pada perguruan tinggi bersifat holistik serta terintegrasi (Rahmat & Tanszil, 2017). Implementasi kehidupan perguruan tinggi yang bersifat dinamis juga ilmiah perlu berbasis nilai-nilai Pancasila juga UUD 1945, sebagai wahana pendidikan karakter yang bersifat empiris, proses, juga berbasis keteladanan. Terlebih mahasiswa merupakan bonus demografi bangsa yang strategis, sehingga perlu dibentuk dengan sebijaksana serta sebaik mungkin, supaya memiliki karakter unggul, substansi itu membuat pemerintah menerapkan suatu instruksi tentang model implementasi pendidikan karakter pada perguruan tinggi, sebagai berikut:

Gambar 4
Realisasi pendidikan karakter pada perguruan tinggi



Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2011)

Tentu tidak sebatas orientasi dalam pengembangan karakter mahasiswa sebagai bonus demografi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat. Karena mereka juga menjadi

bonus demografi bangsa, supaya terjadinya pembelajaran yang bersifat dua arah, baik mahasiswa terhadap masyarakat, maupun sebaliknya, sehingga mengarah pada model *service learning* atau yang lebih dikenal atas pengabdian pada masyarakat. Terlebih pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, melalui Pasal 47, mewajibkan seluruh perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat, supaya pembelajaran karakter tidak sebatas pragmatis serta prosedural, tetapi bermakna bahkan bermanfaat positif untuk perkembangan karakter mahasiswa, juga bagi pemberdayaan masyarakat (*civic empowerment*) sebagai komunitas yang perlu dimulihkan seluruh perguruan tinggi. *Service learning* adalah wahana strategis peningkatan karakter mahasiswa untuk transformasi karakter kepedulian sosial, kemanusiaan, kemahiran sosial, kolaborasi, keterlibatan, komitmen, komunikasi, moral dan nilai, maka *community service learning* berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang komprehensif, progresif, empiris juga terpadu (Jerome, 2012)

Pada basisnya begitu berat amanat, tanggung jawab, juga tugas prodi atau unit kerja penyelenggara pendidikan karakter, karena menjadi proses panjang, maka perlu perencanaan, realisasi, pengawasan, serta evaluasi yang bermutu juga berkelanjutan terlebih pada realisasi pendidikan karakter akan ditemukan berbagai hambatan bahkan tantangan yang perlu disikapi secara, cepat, cermat, utuh dan bijaksana. Tantangan bagi pendidikan tinggi pada globalisasi, adalah: 1) digitalisasi pendidikan, 2) kualifikasi dosen, 3) atensi mahasiswa, 4) adaptasi dan inovasi ilmu pengetahuan dan riset, 5) pengelolaan isu bersifat aktual, 6) konsisten terhadap pengembangan institusi, serta 7) inovasi *service learning*. (Cheung, 2012) Tantangan itu perlu dipandang penting oleh prodi atau unit kerja pelaksana pendidikan karakter, melalui komitmen dan konsistensi untuk penguatan mutu lembaga, personal dan

aktivitas penunjang pembelajaran, serta melakukan kolaborasi berbasis *pentahelix*, karena melibatkan beragam pihak. Model kolaborasi *pentahelix* menekankan urgensi keterlibatan berbagai pihak atau sektor, yaitu, pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta dan media, supaya terjadinya kolaborasi, inovasi, efisiensi, dan keefektifan untuk merealisasikan orientasi bersama, juga tujuan kesejahteraan (Yahya dalam Yuniningsih, et al, 2019)

Tentu prodi atau unit kerja yang melaksanakan pendidikan karakter, melalui mata kuliah wajib, mata kuliah khusus, atau aktivitas non akademik bagi pengembangan kepribadian mahasiswa haruslah konsisten dalam berinovasi, baik pada pembelajaran, kurikulum dan aktivitas resmi penguatan karakter milik mahasiswa, karena berkaitan dengan upaya merealisasikan *civic virtue*. Terlebih Indonesia memiliki ideologi, basis filsafat juga dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni, Pancasila juga UUD 1945, sehingga harus menjadi landasan pendidikan karakter di perguruan tinggi, baik pembelajaran karakter bersifat eksplisit maupun implisit. Supaya beragam program yang berkaitan dengan penguatan karakter milik mahasiswa sebagai bonus demografi bangsa, bisa diwujudkan selaras dengan orientasinya. Tentu beratnya tugas, tanggung jawab, dan amanat dari prodi atau unit kerja yang merealisasikan pendidikan karakter, bisa untuk dipermudah, melalui kolaborasi berbasis *pentahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, juga media), maka orientasi pendidikan karakter, baik secara nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional, bisa terwujud, di lingkungan kurikuler (perguruan tinggi), bahkan pada lingkungan sosio-kultural (masyarakat).

D. KESIMPULAN

Implementasi pendidikan karakter di persekolahan begitu ditekankan melalui Kurikulum Merdeka 2022, melalui profil pelajar Pancasila, membuat pendidikan

karakter menjadi semakin inklusif, untuk memperkuat karakter unggul peserta didik. Realisasi pendidikan karakter di sekolah, pada umumnya berbasis model integrasi, aktivitas ekstrakurikuler, juga kolaborasi, karena bersifat efisien, dan didukung oleh ketersediaan infrastruktur di persekolahan, yang telah memadai, terlebih eksistensi atas mata pelajaran wajib, seperti Agama juga Pancasila dan Kewarganegaraan, kapabel dioptimalkan sebagai pendidikan karakter di persekolahan, akibat struktur, konsep, teori, kurikulum, metode, pendekatan dan praksis atas keilmuannya, begitu relevan dengan konsep pendidikan karakter. Pada basisnya penerapan pendidikan karakter di sekolah, tidak sebatas tanggung jawab dan tugas dari guru mata pelajaran Agama dan Pancasila juga Kewarganegaraan, juga pihak pimpinan sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab dari seluruh guru, karena pada hakikatnya pendidikan adalah memanusiakan manusia juga memberi keteladanan. Sekolah perlu konsisten dalam berinovasi dan beradaptasi dalam pendidikan karakter, akibat realitas globalisasi, westernisasi, serta penurunan moral pada kehidupan masyarakat, melalui pengembangan kurikulum, penguatan mutu tenaga pengajar, dan inovasi pembelajaran karakter, berbasis teoretis dan praktis, agar modern, holistik, juga menyenangkan.

Pendidikan karakter pada perguruan tinggi, begitu dipengaruhi oleh kebijakan institusi, karena diberlakukannya otonomi perguruan tinggi. Maka praktik pendidikan karakter di perguruan tinggi, terbagi atas, 3 model, yaitu berbasis pembelajaran teoretis di dalam kelas, melalui mata kuliah Agama, Pancasila, Bahasa juga Kewarganegaraan, karena struktur keilmuan, materi, teori, dan orientasi keilmuannya begitu relevan untuk dioptimalkan sebagai pendidikan karakter, termasuk melalui mata kuliah khusus, yang dimandatkan oleh konstitusi, supaya turut membentuk karakter mahasiswa. Orientasi pendidikan karakter pada perguruan tinggi, perlu mengarah pada penguatan mutu *civic*

disposition mahasiswa, sebagai indikator terintegrasi, dalam membentuk *civic virtue* sebagai modal sosial merealisasikan *civil society*, maka setiap perguruan tinggi perlu konsisten berinovasi pada pendidikan dan pembelajaran karakter mahasiswa, melalui pengembangan kurikulum, inovasi model pembelajaran karakter, dan pengembangan aktivitas non akademik untuk penguatan karakter mahasiswa. Kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, media) merupakan strategi efektif dalam pendidikan karakter pada perguruan tinggi, karena turut melibatkan semua pihak pada implementasi pendidikan karakter, supaya efektif, menyeluruh dan komprehensif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, I. M., & Dewi, D. A. (2022). Pendidikan Pancasila: Sebuah Upaya Membangun Karakter bangsa Indonesia Yang Kuat Dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1647-1659. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2811>
- Atma, A. (2019). Pengembangan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1), 31-41. <https://doi.org/10.37216/badaa.v1i1.242>
- Barnawi. & Arifin. (2016). *Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Cheung, A. B. L. (2012). Higher Education in Asia: Challenges from and Contributions to Globalization. *International Journal of Chinese Education*, 1, 177-195. <https://doi.org/10.1163%2F22125868-12340003>
- Dafitri, R. S., Rafni, A., & Bakhtiar, Y. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar melalui Profil Pelajar Pancasila di SMKN 1 Sijunjung. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(2), 175-184. <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i2.65>

- Dalyono, B. & Lestariningsih, E. D. (2017). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 33-42. <http://dx.doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v3i2,%20Oktober.865>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Fajri, K. N. (2019). Proses Pengembangan Kurikulum. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 35-48. <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.193>
- Hasanah. (2013). Implementasi Nilai-Nilai Karakter Inti di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 186-195. <https://doi.org/10.21831/jpk.v2i2.1439>
- Hidayah, Y. Ulfah, N. & Suyitno. (2019). Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 22-33. <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp22-33>
- Indriani, N., Suryani, I. & Mukaromah, L. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Khazanah Pendidikan-Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 17(1), 242-252. <http://dx.doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16228>
- Irsan. & Rijal, S. (2020). (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Siswa di Sekolah Dasar Kota Baubau. *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*. 5(1), 10-17. <https://doi.org/10.26618/jkpd.v5i1.3058>
- Jerome, L. (2012). Service Learning and Active Citizenship Education in England. *ECSJ: Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), 59-70. <https://doi.org/10.1177%2F1746197911432594>
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume, 4(4), 5150-5161. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>
- Kabatiah, M. (2021). Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Melalui Teknik Klarifikasi Nilai Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 65-73. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.23730>
- Kahar, A. A. D. A. (2021). Pendidikan Karakter Multidimensi sebagai Aplikasi Konsep Merdeka Belajar dalam Menyambut Bonus Demografi. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 67-89. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.99>
- Kahfi, A. (2022). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya terhadap Karakter Siswa di Sekolah. *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 138-151. <https://doi.org/10.51476/dirasah.v5i2.402>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2011). *Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek Dikti.
- Kobandaha, F. (2017). Pendidikan Karakter melalui Pendekatan Habitiasi. *Irfani*, 13(1), 131-138.
- Kusumawati, E. (2022). Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Jenjang Sekolah Dasar di SD

- Al-Islam 2 Jamsren Surakarta. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 886-893. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3483>
- Lonto, A. L. (2019). Students' Civic Disposition through Learning Civics and Pedagogical Competences of High School Teachers. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12), 35-41. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071905>
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhibah, S. (2020). Model Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Universitas Serang Raya. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18(1), 54-69. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.683>
- Munawwarah, H. & Maemonah. (2021). Pendidikan Karakter Anak Perspektif Aliran Filsafat Behaviorisme. *Jurnal Golden Age*, 5(1), 71-82. <https://doi.org/10.29408/goldenage.v5i01.3106>
- Ni'mawati, dkk. (2020). Model Pengelolaan Pendidikan Karakter Di Sekolah Pada Masa Pandemi. *Jurnal Studi Islam*, 1(2), 145-156. <https://doi.org/10.47281/fas.v1i2.26>
- Paramita, G. V. (2010). Studi Kasus Perbedaan Karakteristik Mahasiswa di Universitas 'X'-Indonesia dengan Universitas 'Y'-Australia. *Humaniora*, 1(2), 629-635. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i2.2904>
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Rangkuman Statistik Persekolahan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Raharja, R. M., Legiani, W. H., Sugiana, D. F. & Lestari, R. Y. (2017). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Warga Negara Mahasiswa FKIP Untirta. *Untirta Civic Education Journal (UCEJ)*, 2(2), 199-213. <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2812>
- Rahim, R. (2018). Urgensi Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU). *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 17-26.
- Rahmat. & Tanszil. (2017). Model Pembinaan Pendidikan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Civicus*, 17(1), 1-17. <https://doi.org/10.17509/civicus.v18i1.12379>
- Ridhwan, M. Yudhyrta, D. Y. & yurisa, A. (2020). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 198-211. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v1i2.82>
- Robby, S. K. I. (2020). Analisis Konsep Dan Kedudukan Mata Kuliah Wajib Umum Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Umum. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 363-369. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4.2143>
- Shih, Y. H. (2019). An Examination of the Functions of a General Education Art Curriculum in Universities. *Policy Futures in Education*, 17(3), 307-317. <https://doi.org/10.1177/20471478210318811012>
- Sholekah, F. F. (2020). Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.1234/cej.v1i1.3620>
- Siregar, N. Sahirah, R. & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0.

- Fitrah: Journal of Islamic Education (FJIE)*, 1(1), 142-157.
- Suartama, I. K. Triwahyuni, E. Abbas, S. Hastuti, W. D. Usman, M. Subiyantoro, S. Umar. & Salehudin, M. Development of E-Learning Oriented Inquiry Learning Based on Character Education in Multimedia Course. *European Journal of Education Research*, 9(4), 1592-1603. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.4.1591>
- Suatno. & Nurdiyana. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 107-114. <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p107-114>
- Surya, Y. F. (2017). Penggunaan Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Abad 21 pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 52-61. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.31>
- Syofyan, H. (2017). Membangun Peradaban dengan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah. *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 45-57.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Triatmanto. (2010). Tantangan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3, 187-202. <https://doi.org/10.21831/cp.v1i3.245>
- Tyas, E. H. Sunatro. & Naibaho, L. (2020). Building Superior Human Resources through Character Education. *TEST: Engineering & Management*, 83, 11864-11873.
- Widihastuti. (2013). Strategi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Melalui Penerapan Assessment For Learning Berbasis Higher Order Thinking Skills. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(1), 38-52. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1286>
- Widodo, H. (2018). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah Sleman. *Metode Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 13(2), 69-80. <https://doi.org/10.17509/md.v13i2.8162>
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>
- Yuniningsih, T. Darmi, T. & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *JPSI: Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84-93. <http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>
- Zulkiffi. & Wirdaningsih. (2020). Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfidz di SMA Negeri 5 Padang. *Jurnal SIKOLA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(3), 199-207. <https://doi.org/10.24036/sikola.v1i3.23>